

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) :

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock:

Pajak adalah suatu penagihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya dan berbunyi sebagai berikut, "Pajak adalah peralihan uang/harta dari sector swasta/ individu ke sector masyarakat/pemerintahan tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan mengurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi) sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dari pola individu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai

pengeluaran umum serta apabila dari masyarakat tidak melunasi akan mendapat sanksi oleh Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Penerimaan (Regulatoir)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Berdasarkan fungsi-fungsi pajak tersebut bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana penerimaan dalam negeri, sebagai alat untuk mengatur kebijakan dalam bidang ekonomi dan social, dalam fungsi redtribusi ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, dan merupakan wujud sistem gotong royong.

2.1.3 Jenis Pajak

2.1.3.1 Berdasarkan Pihak yang Menanggung

1. Pajak Langsung

Pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh, Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.

2.1.3.2 Berdasarkan Pihak yang Memungut

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan. Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.

2.1.3.3 Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh.

2. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

Berdasarkan jenis pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun jenis pajak yang ada pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak, pajak merupakan sumber penerimaan Negara baik pajak pusat maupun pajak daerah, penentuan tarif pajak disesuaikan dengan kondisi keadaan wajib pajak.

2.2 Pemahaman Wajib Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia

wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Resmi (2009, dalam Nugroho, 2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih, 2011). Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*.

Kesimpulannya bahwa pemahaman wajib pajak berperan penting dalam penerapan *self assessment system* sebagai salah satu kunci mendukung suksesnya pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah “rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “satu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.4 Penerapan *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) :

Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Siti Resmi (2009:27), *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dapat disimpulkan, bahwa *Self Assessment System* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-

ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2009:127), “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Wajib pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak dapat memperoleh banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, aparat pajak dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan adanya pengenaan sanksi perpajakan secara tegas oleh Direktorat Jendral Perpajakan. Berdasarkan penjabaran di atas maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System*

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai penerapan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

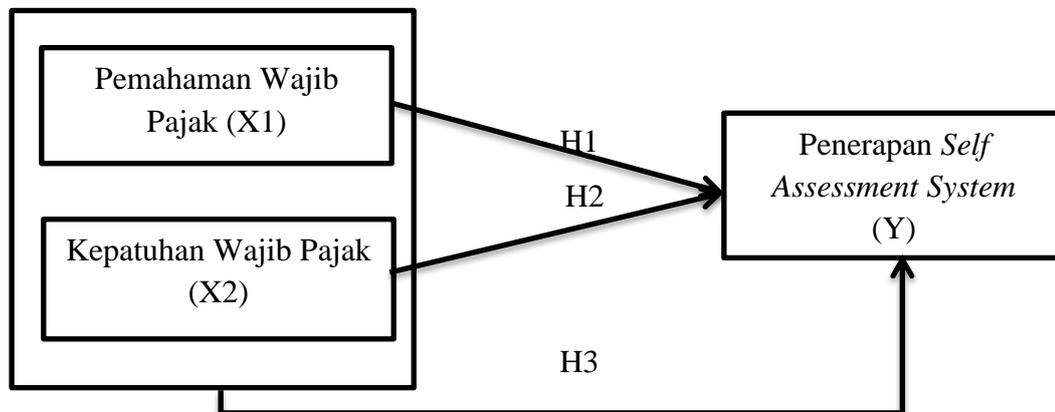
Hasil penelitian Farrisa Tantry (2009) menunjukkan bahwa pemahan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan *self assessment system*.

2.5.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System*

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000.

Hasil penelitian Ari Bramasto (2009) menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas *Self Assessment System*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Penerapan *Self Assessment System* baik secara simultan maupun secara parsial. Diukur dengan menggunakan kuesioner yang diberi skor menggunakan skala likert.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*.
- H₂ : Diduga kepatuhan wajib pajak oran pribadi berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*.
- H₃ : Diduga pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan perpajakan. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *self assessment system* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil
1.	Farrisa Tantry (2009)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan <i>Self Assessment System</i> Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Dependen : Penerapan <i>Self Assessment System</i> Independen: Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerapan <i>Self Assessment System</i>
2.	Shintawati (2014)	Pengaruh Pemahaman wajib Pajak dan Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priadi Independen : Pemahaman wajib Pajak dan Penerapan <i>Self Assessment System</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Padang. Sedangkan Penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Padang. Namun pemahaman Wajib Pajak

				dan penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang.
3.	Wiwik Andriyani (2011)	Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	Dependen : <i>Self Assessment System</i> Independen : Pemahaman Wajib Pajak	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman WPOP pada pelaksanaan self assesment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham.
4.	Ari Bramasto (2009)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem <i>Self Assessment</i>	Dependen: Efektivitas Sistem <i>Self Assessment</i> Independen: Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Sistem Menghitung Pajak Sendiri. <i>Self Assessment</i> .
5.	Mita Kuraesin (2013)	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Pajak	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Pengetahuan Pajak Dan <i>Self Assessment System</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan <i>self assessment system</i> secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

6.	Fibria Anggraini P.L (2014)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: Faktor-faktor kepatuhan pajak WP OP (perilaku individu, motivasi, iklim organisasi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kepatuhan pajak WP OP secara bersama-sama dan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.
7.	Rini Sugiharti (2013)	Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Dependen: Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Independen: Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (menghitung, membayar, melaporkan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fungsi menghitung belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, fungsi membayar tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan self Assessment System dikarenakan seluruh sampel melakukan pembayaran pajaknya diatas tanggal 15, dan fungsi melapor berpengaruh terhadap pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>

Sumber: Penelitian terdahulu 2009-2014